



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka perlu disusun daftar kodefikasi dan klasifikasi;

b. bahwa daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam Bagan Akun Standar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal,
2. Bupati adalah Bupati Tegal,
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
6. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 3

- (1) BAS menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur Laporan Keuangan secara lengkap.
 - (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6 meliputi :
 - a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. Level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
-

- f. Level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan.
- (4) Rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I	ASET		
I.1	ASET LANCAR		
I.1.01	Kas dan Setara Kas	D	
I.1.01.01	Kas di Kas Daerah		
I.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		
I.1.01.01.01.01	Kas di Kas Daerah		
I.1.01.01.01.02	Deposito		
I.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
I.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		
I.1.01.02.01.01	Kas di Bendahara Penerimaan		
I.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
I.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		
I.1.01.03.01.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		
I.1.01.03.01.02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai		
I.1.01.04	Kas di BLUD		
I.1.01.04.01	Kas di BLUD		
I.1.01.04.01.01	Kas di BLUD		
I.1.01.05	Kas Dana BOS		
I.1.01.05.01	Kas Dana BOS		
I.1.01.05.01.01	Kas Dana BOS		
I.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
I.1.01.06.01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
I.1.01.06.01.01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
I.1.01.07	Kas Lainnya		
I.1.01.07.01	Kas Lainnya		
I.1.01.07.01.01	Kas Lainnya		
I.1.01.08	Setara Kas		
I.1.01.08.01	Setara Kas		
I.1.01.08.01.01	Setara Kas		
I.1.02	Investasi Jangka Pendek	D	
I.1.02.01	Investasi dalam Saham		
I.1.02.01.01	Investasi dalam Saham		
I.1.02.01.01.01	Investasi dalam Saham		
I.1.02.02	Investasi dalam Deposito		
I.1.02.02.01	Deposito Jangka Pendek		
I.1.02.02.01.01	Deposito Jangka Pendek		
I.1.02.03	Investasi dalam SUN		
I.1.02.03.01	Investasi dalam SUN		
I.1.02.03.01.01	Investasi dalam SUN		
I.1.02.04	Investasi dalam SBI		
I.1.02.04.01	Investasi dalam SBI		
I.1.02.04.01.01	Investasi dalam SBI		
I.1.02.05	Investasi dalam SPN		
I.1.02.05.01	Investasi dalam SPN		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.02.05.01.01	Investasi dalam SPN	D	
I.1.02.06	Investasi Jangka Pendek BLUD		
I.1.02.06.01	Investasi Jangka Pendek BLUD		
I.1.02.06.01.01	Investasi Jangka Pendek BLUD		
I.1.03	Piutang Pajak Daerah		
I.1.03.01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
I.1.03.01.01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan		
I.1.03.01.01.01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi		
I.1.03.01.01.02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum		
I.1.03.01.01.03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.01.04	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep		
I.1.03.01.02.01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi		
I.1.03.01.02.02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum		
I.1.03.01.02.03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.02.04	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus		
I.1.03.01.03.01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi		
I.1.03.01.03.02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum		
I.1.03.01.03.03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.03.04	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus		
I.1.03.01.04.01	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi		
I.1.03.01.04.02	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum		
I.1.03.01.04.03	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.04.04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus		
I.1.03.01.05.01	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi		
I.1.03.01.05.02	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum		
I.1.03.01.05.03	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.05.04	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		
I.1.03.01.06.01	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi		
I.1.03.01.06.02	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.03.01.06.03	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.06.04	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.07	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		
I.1.03.01.07.01	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi		
I.1.03.01.07.02	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum		
I.1.03.01.07.03	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.07.04	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.08	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck		
I.1.03.01.08.01	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi		
I.1.03.01.08.02	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum		
I.1.03.01.08.03	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.08.04	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.09	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		
I.1.03.01.09.01	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi		
I.1.03.01.09.02	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum		
I.1.03.01.09.03	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.09.04	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.10	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		
I.1.03.01.10.01	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi		
I.1.03.01.10.02	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum		
I.1.03.01.10.03	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.10.04	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.11	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga		
I.1.03.01.11.01	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi		
I.1.03.01.11.02	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum		
I.1.03.01.11.03	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat		
I.1.03.01.11.04	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah		
I.1.03.01.12	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air		
I.1.03.01.12.01	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.I.03.01.12.02	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum		
I.I.03.01.12.03	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat		
I.I.03.01.12.04	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah		
I.I.03.01.13	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar		
I.I.03.01.13.01	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi		
I.I.03.01.13.02	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum		
I.I.03.01.13.03	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat		
I.I.03.01.13.04	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah		
I.I.03.01.14	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga		
I.I.03.01.14.01	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi		
I.I.03.01.14.02	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum		
I.I.03.01.14.03	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat		
I.I.03.01.14.04	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah		
I.I.03.02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
I.I.03.02.01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan		
I.I.03.02.01.01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan		
I.I.03.02.02	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep		
I.I.03.02.02.01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep		
I.I.03.02.03	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus		
I.I.03.02.03.01	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus		
I.I.03.02.04	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus		
I.I.03.02.04.01	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus		
I.I.03.02.05	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus		
I.I.03.02.05.01	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus		
I.I.03.02.06	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		
I.I.03.02.06.01	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up		
I.I.03.02.07	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		
I.I.03.02.07.01	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck		
I.I.03.02.08	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck		
I.I.03.02.08.01	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck		
I.I.03.02.09	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		
I.I.03.02.09.01	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van		
I.I.03.02.10	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.I.03.02.10.01	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua		
I.I.03.02.11	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga		
I.I.03.02.11.01	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga		
I.I.03.02.12	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air		
I.I.03.02.12.01	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air		
I.I.03.02.13	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat		
I.I.03.02.13.01	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat		
I.I.03.02.14	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga		
I.I.03.02.14.01	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga		
I.I.03.03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		
I.I.03.03.01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin		
I.I.03.03.01.01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin		
I.I.03.03.02	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar		
I.I.03.03.02.01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar		
I.I.03.03.03	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas		
I.I.03.03.03.01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas		
I.I.03.03.04	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya		
I.I.03.03.04.01	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya		
I.I.03.04	Piutang Pajak Air Permukaan		
I.I.03.04.01	Piutang Pajak Air Permukaan		
I.I.03.04.01.01	Piutang Pajak Air Permukaan		
I.I.03.05	Piutang Pajak Rokok		
I.I.03.05.01	Piutang Pajak Rokok		
I.I.03.05.01.01	Piutang Pajak Rokok		
I.I.03.06	Piutang Pajak Hotel		
I.I.03.06.01	Piutang Pajak Hotel		
I.I.03.06.01.01	Piutang Pajak Hotel		
I.I.03.06.02	Piutang Pajak Motel		
I.I.03.06.02.01	Piutang Pajak Motel		
I.I.03.06.03	Piutang Pajak Losmen		
I.I.03.06.03.01	Piutang Pajak Losmen		
I.I.03.06.04	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata		
I.I.03.06.04.01	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata		
I.I.03.06.05	Piutang Pajak Wisma Pariwisata		
I.I.03.06.05.01	Piutang Pajak Wisma Pariwisata		
I.I.03.06.06	Piutang Pajak Pesanggrahan		
I.I.03.06.06.01	Piutang Pajak Pesanggrahan		
I.I.03.06.07	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya		
I.I.03.06.07.01	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya		
I.I.03.06.08	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.03.06.08.01	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)		
I.1.03.07	Piutang Pajak Restoran		
I.1.03.07.01	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya		
I.1.03.07.01.01	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya		
I.1.03.07.02	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		
I.1.03.07.02.01	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		
I.1.03.07.03	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		
I.1.03.07.03.01	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		
I.1.03.07.04	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya		
I.1.03.07.04.01	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya		
I.1.03.07.05	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya		
I.1.03.07.05.01	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya		
I.1.03.07.06	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya		
I.1.03.07.06.01	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya		
I.1.03.07.07	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya		
I.1.03.07.07.01	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya		
I.1.03.08	Piutang Pajak Hiburan		
I.1.03.08.01	Piutang Pajak Tontonan Film		
I.1.03.08.01.01	Piutang Pajak Tontonan Film		
I.1.03.08.02	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana		
I.1.03.08.02.01	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana		
I.1.03.08.03	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya		
I.1.03.08.03.01	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya		
I.1.03.08.04	Piutang Pajak Pameran		
I.1.03.08.04.01	Piutang Pajak Pameran		
I.1.03.08.05	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya		
I.1.03.08.05.01	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya		
I.1.03.08.06	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap		
I.1.03.08.06.01	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap		
I.1.03.08.07	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling		
I.1.03.08.07.01	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling		
I.1.03.08.08	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan		
I.1.03.08.08.01	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan		
I.1.03.08.09	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)		

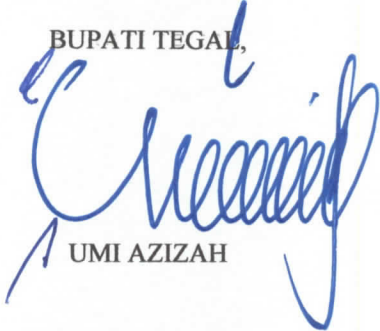
KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.03.08.09.01	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)		
I.1.03.08.10	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga		
I.1.03.08.10.01	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga		
I.1.03.09	Piutang Pajak Reklame		
I.1.03.09.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		
I.1.03.09.01.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		
I.1.03.09.02	Piutang Pajak Reklame Kain		
I.1.03.09.02.01	Piutang Pajak Reklame Kain		
I.1.03.09.03	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker		
I.1.03.09.03.01	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker		
I.1.03.09.04	Piutang Pajak Reklame Selebaran		
I.1.03.09.04.01	Piutang Pajak Reklame Selebaran		
I.1.03.09.05	Piutang Pajak Reklame Berjalan		
I.1.03.09.05.01	Piutang Pajak Reklame Berjalan		
I.1.03.09.06	Piutang Pajak Reklame Udara		
I.1.03.09.06.01	Piutang Pajak Reklame Udara		
I.1.03.09.07	Piutang Pajak Reklame Apung		
I.1.03.09.07.01	Piutang Pajak Reklame Apung		
I.1.03.09.08	Piutang Pajak Reklame Suara		
I.1.03.09.08.01	Piutang Pajak Reklame Suara		
I.1.03.09.09	Piutang Pajak Reklame Film/Slide		
I.1.03.09.09.01	Piutang Pajak Reklame Film/Slide		
I.1.03.09.10	Piutang Pajak Reklame Peragaan		
I.1.03.09.10.01	Piutang Pajak Reklame Peragaan		
I.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan		
I.1.03.10.01	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri		
I.1.03.10.01.01	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri		
I.1.03.10.02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		
I.1.03.10.02.01	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		
I.1.03.11	Piutang Pajak Parkir		
I.1.03.11.01	Piutang Pajak Parkir		
I.1.03.11.01.01	Piutang Pajak Parkir		
I.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah		
I.1.03.12.01	Piutang Pajak Air Tanah		
I.1.03.12.01.01	Piutang Pajak Air Tanah		
I.1.03.13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
I.1.03.13.01	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
I.1.03.13.01.01	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
I.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
I.1.03.14.01	Piutang Pajak Asbes		
I.1.03.14.01.01	Piutang Pajak Asbes		
I.1.03.14.02	Piutang Pajak Batu Tulis		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.I.03.14.02.01	Piutang Pajak Batu Tulis		
I.I.03.14.03	Piutang Pajak Batu Setengah Permata		
I.I.03.14.03.01	Piutang Pajak Batu Setengah Permata		
I.I.03.14.04	Piutang Pajak Batu Kapur		
I.I.03.14.04.01	Piutang Pajak Batu Kapur		
I.I.03.14.05	Piutang Pajak Batu Apung		
I.I.03.14.05.01	Piutang Pajak Batu Apung		
I.I.03.14.06	Piutang Pajak Batu Permata		
I.I.03.14.06.01	Piutang Pajak Batu Permata		
I.I.03.14.07	Piutang Pajak Bentonit		
I.I.03.14.07.01	Piutang Pajak Bentonit		
I.I.03.14.08	Piutang Pajak Dolomit		
I.I.03.14.08.01	Piutang Pajak Dolomit		
I.I.03.14.09	Piutang Pajak Felspar		
I.I.03.14.09.01	Piutang Pajak Felspar		
I.I.03.14.10	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)		
I.I.03.14.10.01	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)		
I.I.03.14.11	Piutang Pajak Grafit		
I.I.03.14.11.01	Piutang Pajak Grafit		
I.I.03.14.12	Piutang Pajak Granit/Andesit		
I.I.03.14.12.01	Piutang Pajak Granit/Andesit		
I.I.03.14.13	Piutang Pajak Gips		
I.I.03.14.13.01	Piutang Pajak Gips		
I.I.03.14.14	Piutang Pajak Kalsit		
I.I.03.14.14.01	Piutang Pajak Kalsit		
I.I.03.14.15	Piutang Pajak Kaolin		
I.I.03.14.15.01	Piutang Pajak Kaolin		
I.I.03.14.16	Piutang Pajak Leusit		
I.I.03.14.16.01	Piutang Pajak Leusit		
I.I.03.14.17	Piutang Pajak Magnesit		
I.I.03.14.17.01	Piutang Pajak Magnesit		
I.I.03.14.18	Piutang Pajak Mika		
I.I.03.14.18.01	Piutang Pajak Mika		
I.I.03.14.19	Piutang Pajak Marmer		
I.I.03.14.19.01	Piutang Pajak Marmer		
I.I.03.14.20	Piutang Pajak Nitrat		
I.I.03.14.20.01	Piutang Pajak Nitrat		
I.I.03.14.21	Piutang Pajak Opsidien		
I.I.03.14.21.01	Piutang Pajak Opsidien		
I.I.03.14.22	Piutang Pajak Oker		
I.I.03.14.22.01	Piutang Pajak Oker		
I.I.03.14.23	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil		
I.I.03.14.23.01	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil		
I.I.03.14.24	Piutang Pajak Pasir Kuarsa		
I.I.03.14.24.01	Piutang Pajak Pasir Kuarsa		
I.I.03.14.25	Piutang Pajak Perlit		
I.I.03.14.25.01	Piutang Pajak Perlit		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.03.14.26	Piutang Pajak Phospat		
I.1.03.14.26.01	Piutang Pajak Phospat		
I.1.03.14.27	Piutang Pajak Talk		
I.1.03.14.27.01	Piutang Pajak Talk		
I.1.03.14.28	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)		
I.1.03.14.28.01	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)		
I.1.03.14.29	Piutang Pajak Tanah Diatome		
I.1.03.14.29.01	Piutang Pajak Tanah Diatome		
I.1.03.14.30	Piutang Pajak Tanah Liat		
I.1.03.14.30.01	Piutang Pajak Tanah Liat		
I.1.03.14.31	Piutang Pajak Tawas (Alum)		
I.1.03.14.31.01	Piutang Pajak Tawas (Alum)		
I.1.03.14.32	Piutang Pajak Tras		
I.1.03.14.32.01	Piutang Pajak Tras		
I.1.03.14.33	Piutang Pajak Yarosif		
I.1.03.14.33.01	Piutang Pajak Yarosif		
I.1.03.14.34	Piutang Pajak Zeolit		
I.1.03.14.34.01	Piutang Pajak Zeolit		
I.1.03.14.35	Piutang Pajak Basal		
I.1.03.14.35.01	Piutang Pajak Basal		
I.1.03.14.36	Piutang Pajak Trakit		
I.1.03.14.36.01	Piutang Pajak Trakit		
I.1.03.14.37	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		
I.1.03.14.37.01	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		
I.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
I.1.03.15.01	Piutang PBBP2		
I.1.03.15.01.01	Piutang PBBP2		
I.1.03.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
I.1.03.16.01	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak		
I.1.03.16.01.01	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak		
I.1.03.16.02	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru		
I.1.03.16.02.01	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru		
I.1.04	Piutang Retribusi Daerah	D	
I.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum		
I.1.04.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		
I.1.04.01.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		
I.1.04.01.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling		
I.1.04.01.01.03	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu		
I.1.04.01.01.04	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan		
I.1.04.01.01.05	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
I.1.04.01.01.06	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis		
I.1.04.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		
I.1.04.01.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		
I.1.04.01.03	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
I.1.04.01.03.01	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat		
I.1.04.01.03.02	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat		
I.1.04.01.04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
I.1.04.01.04.01	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
I.1.04.01.05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
I.1.04.01.05.01	Piutang Retribusi Pelataran		
I.1.04.01.05.02	Piutang Retribusi Los		
I.1.04.01.05.03	Piutang Retribusi Kios		
I.1.04.01.06	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
I.1.04.01.06.01	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
I.1.04.01.07	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
I.1.04.01.07.01	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran		
I.1.04.01.07.02	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran		
I.1.04.01.07.03	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa		
I.1.04.01.08	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
I.1.04.01.08.01	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)		
I.1.04.01.08.02	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto		
I.1.04.01.08.03	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital		
I.1.04.01.08.04	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik		
I.1.04.01.08.05	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)		
I.1.04.01.09	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
I.1.04.01.09.01	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
I.1.04.01.10	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
I.1.04.01.10.01	Piutang Retribusi Rumah Tangga		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
9.2.01.05.01.03	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Gaji/TPP		
9.2.01.05.01.04	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Non PNS		
9.2.01.05.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		
9.2.01.05.02.01	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		
9.2.01.05.03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		
9.2.01.05.03.01	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		
9.2.01.05.04	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25		
9.2.01.05.04.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25		
9.2.01.05.05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4		
9.2.01.05.05.01	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan		
9.2.01.05.05.02	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan		
9.2.01.05.05.03	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi		
9.2.01.05.06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15		
9.2.01.05.06.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 15		
9.2.01.05.07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 26		
9.2.01.05.07.01	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 26 Jasa		
9.2.01.05.08	Pengeluaran PFK - PPh Final		
9.2.01.05.08.01	Pengeluaran PFK - PPh Badan Usaha (0,5%)		
9.2.01.06	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
9.2.01.06.01	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		
9.2.01.06.01.01	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		
9.2.01.07	Pengeluaran PFK - Taperum		
9.2.01.07.01	Pengeluaran PFK - Taperum		
9.2.01.07.01.01	Pengeluaran PFK - Taperum		
9.2.01.08	Pengeluaran PFK - Lainnya		
9.2.01.08.01	Pengeluaran PFK - Lainnya		
9.2.01.08.01.01	Pengeluaran PFK - Lainnya		
9.2.01.08.02	Pengeluaran PFK - Sewa Rumah		
9.2.01.08.02.01	Pengeluaran PFK - Sewa Rumah		
9.2.01.08.03	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)		
9.2.01.08.03.01	Pengeluaran PFK - Beras (BULOG)		

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH